

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Ekonomi Pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ASMA UL HUSNA

2016/16053051

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DI KABUPATEN SOLOK**

Nama : Asma Ul Husna
BP/NIM : 2016 / 16053051
Keahlian : Akuntansi
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Disetujui oleh
Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd
NIP 19820311 200501 2 005

Padang, Maret 2022
Pembimbing



Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd
NIP 19800112 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

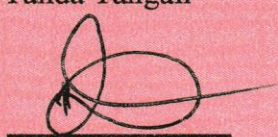
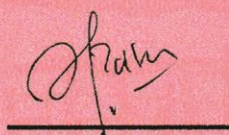
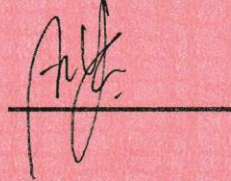
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI KABUPATEN SOLOK

Nama : Asma Ul Husna
BP/ NIM : 2016/16053051
Keahlian : Akuntansi
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd	 _____
2.	Anggota	Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd	 _____
3.	Anggota	Annur Fitri Hayati, S.Pd, M.Pd	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asma Ul Husna
NIM/Tahun Masuk : 16053051/2016
Tempat/Tgl. Lahir : Cupak, 23 November 1998
Jurusan/Keahlian : Pendidikan Ekonomi/ Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Solok
No. Hp/ Telephone : 089621195396

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Maret 2022

Penulis



Asma Ul Husna
Asma Ul Husna
NIM. 16053051

ABSTRAK

**Asma Ul Husna,
(2016/16053051)**

: Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Di Kabupaten Solok

Dosen Pembimbing

: Dr. Dessi Susanti, S.Pd,M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (2) Pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (4) Pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif. Data yang digunakan adalah laporan APBD dan laporan realisasi APBD Kabupaten Solok dari tahun 1990-2019 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Subjek penelitian adalah seluruh data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t statistik dengan α sebesar 5% dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan di Kabupaten Solok.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Di Kabupaten Solok**”. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai figur yang senantiasa memberikan inspirasi tentang berbagai hal dalam menyikapi kehidupan menuju ridha-Nya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan penuh cinta dari berbagai pihak terutama oleh pembimbing. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih teristimewa kepada ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dan dengan sabar membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Ibu Annur Fitri Hayati, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing Akademik.

3. Ibu Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd dan Ibu Annur Fitri Hayati, S.Pd, M.Pd selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Alianis, M.S, Bapak Halkadri Fitra, SE, MM.Ak., Bapak dan Ibu dosen ilmu ekonomi yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
6. Teristimewa terimakasih kepada, Ibunda Rostina, Apaa Usnandi, Kakakku Dedet Febriana, S.Pd.I, Abang Adi Usnandi, Nenek Almh. Ramadiana dan keluarga besar yang sudah memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk sahabat terbaik selama perkuliahan, Dian Islamiati, Mela Rosiana Dewi, S.Pd, Hikmatul Yulia Sari, Arlin Ayu Fitria yang selalu ada dan memberikan dukungan kepada penulis
8. Teruntuk sahabat terbaik, Sun alias Ridha Kurnia Fajri, S.Ak yang sudah selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Thank you for being my bestfriend. Thank you for all the support u given.
9. Teruntuk Sri Moniaga Putri, SPd yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, yang memberikan saran dan masukan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

10. Serta kepada orang-orang baik yang berada di sekitar penulis, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi pembacanya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Padang, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	14
1. Kinerja Keuangan.....	14
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
B. Penelitian Yang Relevan	32
C. Hubungan Antar Variabel	35
D. Kerangka Konseptual	37
E. Hipotesis.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Subjek Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Definisi Operasional Variabel.....	41

F. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Analisis Statistik Deskriptif	58
C. Uji Asumsi Klasik	59
D. Analisis Regresi.....	63
E. Uji Hipotesis.....	65
F. Pembahasan.....	67
G. Keterbatasan Penelitian.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	25
Tabel 2. Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Solok tahun 2018	49
Tabel 3. Kinerja Keuangan Kabupaten Solok Tahun 1990-2019	51
Tabel 4. Pajak Daerah Kabupaten Solok Tahun 1990-2019	52
Tabel 5. Retribusi Daerah Kabupaten Solok Tahun 1990-2019	54
Tabel 6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Solok Tahun 1990-2019	55
Tabel 7. Pendapatan Lain-lain Yang Sah Kabupaten Solok Tahun 1990-2019	57
Tabel 8. Hasil Analisis Deskriptif	58
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel 12. Hasil Analisis Regresi	63
Tabel 13. Koefisien Korelasi Antara Kinerja Dengan Komponen PAD	64
Tabel 14. Nilai T-Hitung Untuk Komponen PAD	65
Tabel 15. Nilai F-Hitung Untuk PAD	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok	9
Grafik 2. Rasio Desentralisasi Fiskal	10
Grafik 3. Grafik Scatterplot	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Jika dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu: 1. Era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999), 2. Era transisi otonomi (2000-2003), dan 3. Era pascatransisi (2004-sekarang).

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2018 : 6). Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Dimasa depan pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi masyarakat.

Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi

pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagai upaya konkret, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Dalam rangka desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah memiliki peran vital dalam mengimplentasikan rencana kerja pembangunan daerah dan juga secara tidak langsung mendukung rencana pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk mengedepankan kemandirian daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Peningkatan kemandirian

daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2016:140)

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Arsa, 2015:85).

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila

setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing. Dalam hal ini kinerja keuangan daerah memiliki peranan yang penting dikarenakan kinerja keuangan dijadikan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk memanfaatkan keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 33 Tahun 2004). Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Citra keuangan pemerintah daerah tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Sebuah Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Daerah menekankan hasil atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah yang terdiri atas: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis kinerja keuangan daerah dengan rasio keuangan terhadap APBD khususnya pada komponen PAD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2012:230).

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang diberi wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan penyerahan wewenang tersebut tentunya pemerintah berharap agar Kabupaten Solok dapat menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Bank Indonesia yang menyatakan bahwa ketergantungan pendapatan dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat terhadap transfer dana dari pusat berupa dana perimbangan masih tetap tinggi. Dana perimbangan berkontribusi sebesar 79,29% terhadap realisasi pendapatan pada triwulan III 2017, turun dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 83,03%. Masih tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan menunjukkan bahwa PAD perlu ditingkatkan karena masih rendah yaitu hanya sebesar 9,25% meski telah menunjukkan kontribusi yang meningkat dibandingkan triwulan III 2016. Ketergantungan pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Barat terhadap transfer dana dari pusat berupa Dana Perimbangan (DP) juga tinggi. Meskipun terdapat 7 kabupaten/kota (Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh) memiliki rasio PAD terhadap pendapatan total melebihi 10%, tingkat ketergantungan pendapatan terhadap dana perimbangan 12 kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat masih tergolong tinggi. Penopang PAD dari 7 kabupaten/kota tersebut adalah pajak hotel/restoran serta pajak penerangan jalan.

Sementara itu, Kota Dharmasraya, Kota Pariaman dan Kabupaten Solok tercatat sebagai kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan porsi PAD terhadap total pendapatan yang terkecil pada triwulan III 2017. (<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumbar/Documents/Kajian%20Ekonomi%20dan%20Keuangan%20Regional%20Sumbar%20November%202017.pdf>)

Indikasi turunnya kinerja keuangan daerah dapat kita lihat dari turunnya pendapatan asli daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyatakan bahwa terjadinya penurunan yang drastis pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok dari tahun 2017 ke tahun 2018 dimana realisasi PAD pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 113,2 miliar sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 68,3 miliar. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Solok antara lain:

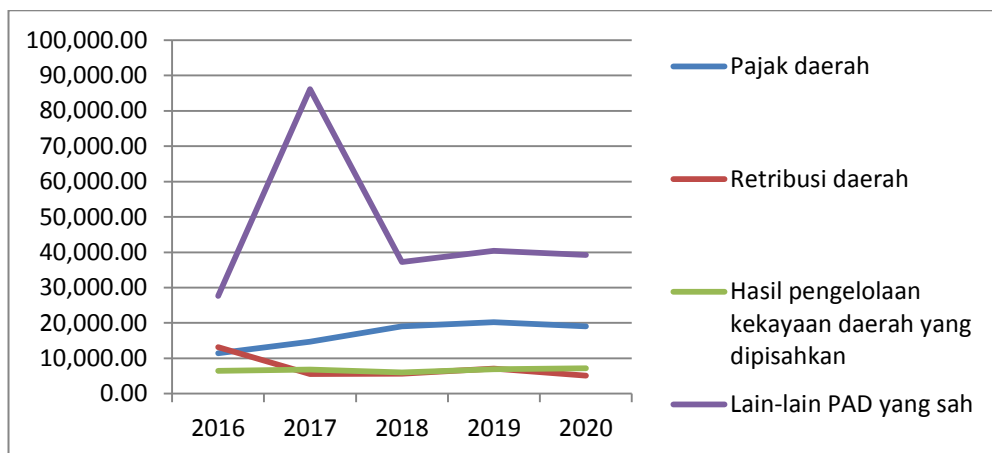
1. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Alfis Primatra yang menilai rendahnya PAD Kabupaten Solok dikarenakan potensi daerah belum

tergarap maksimal. Berdasarkan informasi yang ia himpun, Kabupaten Solok membutuhkan banyak fasilitas yang harus segera dimiliki. Seperti pasar induk beras, sayur dan buah, pangkalan truk pengangkut hasil bumi, pembangunan terminal kendaraan umum, kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan pasar raya Kabupaten Solok. Fasilitas tersebut berpotensi memberikan pemasukan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan data, target PAD Kabupaten Solok tahun 2018 adalah Rp 71 miliar. Padahal kebutuhan APBD sekitar Rp 1,2 triliun setahun. (<https://sumbarpost.com/alfis-primatra-pad-kabupaten-solok-rendah-karena-potesi-belum-tergarap-maksimal/>).

Menurunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok salah satunya berasal dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor atau KIR seperti halnya yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, Senin (16/7) di gedung Wakil Rakyat, Arosuka mengungkapkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor atau KIR tahun 2017 Kabupaten Solok jauh menurun dari pendapatan tahun 2016. “Pada tahun 2017 retribusi pengujian kendaraan bermotor hanya tercapai 67,12%. Kedepan, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok harus lebih serius dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor atau KIR ini,” tegasnya. Sementara itu, Bupati Solok, H. Gusmal membantah Pemerintah Kabupaten Solok tidak serius dalam menangani persoalan uji KIR. Bupati berpendapat, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor atau KIR tahun 2017, lebih dikarenakan adanya

perubahan regulasi tentang numpang KIR kendaraan bermotor. Namun diakui Bupati, tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor atau KIR tahun 2017 sangat berpengaruh pada realisasi pendapatan dari retribusi daerah secara umum. Retribusi daerah hanya tercapai 72,38%.“ Tidak tercapainya realisasi pendapatan retribusi daerah 100% karena adanya pendapatan retribusi yang realisasinya sangata rendah. Diantaranya retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi terminal, rtribusi tempat penginapan/pesanggrahan dan villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi izin trayek,” ujar, H. Gusmal. (<https://www.anta-news.com/kab-solok/turunnya-pad-sektor-retribusi-pengujian-kendaraan-bermotor-kir-jadi-sorotan-dewan/>)



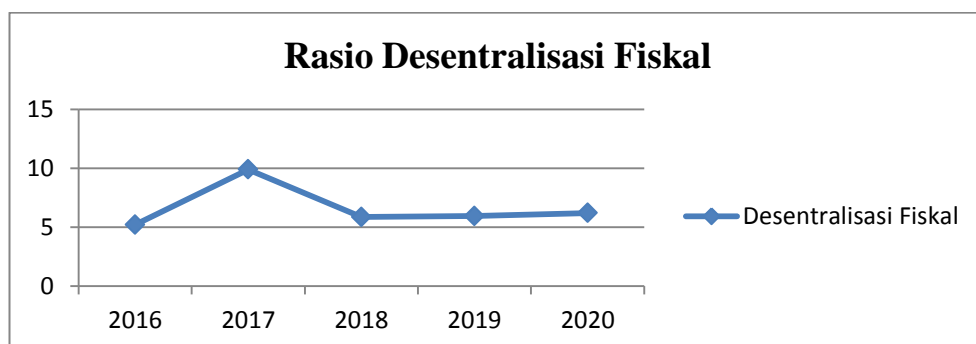
Grafik 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2020

Sumber : Data Diolah 2022

Pada grafik 1, dapat kita ketahui bahwa perkembangan komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Solok dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang bertahap pada komponen pajak daerah. Sedangkan pada

komponen lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hal tersebut juga terjadi pada komponen PAD lainnya yang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Namun dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Solok diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan daerahnya sendiri agar tercapai kemandirian sebagai tujuan dari adanya otonomi daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel maka dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Salah satu rasio kinerja keuangan yang dapat digunakan adalah Rasio Desentralisasi Fiskal. Rasio ini membandingkan antara total realisasi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Menurut Widodo (Halim, 2012:230) semakin tinggi hasilnya, maka suatu daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.



Grafik 2. Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2022

Sumber : Data Diolah 2022

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok sangat kurang karena rata-rata $<10,00$. Sedangkan untuk berada

pada tingkat kemampuan keuangan daerah yang cukup haruslah memiliki derajat desentralisasi yang berkisar antara 20,01-30,00.

Sehingga dengan menggunakan rasio desentralisasi fiskal dalam menghitung kinerja keuangan daerah, penulis mencoba meneliti seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Solok serta komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah apa saja yang secara dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Solok tahun 1990-2019. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul mengenai “ Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Di Kabupaten Solok”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan bahwa:

1. Penilaian kinerja keuangan pemerintahan penting dilakukan karena berkaitan dengan distribusi kesejahteraan masyarakat.
2. Pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok.

C. Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya kinerja keuangan. Tapi disini penulis batasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok?
4. Apakah pendapatan lain-lain berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok?
5. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok.

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan lain-lain yang sah terhadap kinerja Keuangan di Kabupaten Solok.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Solok, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Masyarakat, sebagai bentuk informasi pendapatan asli daerah dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama dengan penelitian ini.